

Ary Kembalikan Uang Perjalanan Dinas



ARY PUDYANTI.

FOTO: DOK

Pontianak, BERKAT.

Ketua Fraksi Demokrat, Ary Pudyanti, SE, mengatakan 11 anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat sudah mengembalikan uang perjalanan dinas tahun anggaran 2010 yang teridentifikasi merugikan negara sesuai dengan hasil temuan BPK-RI.

Menurut Ary pihaknya, sudah mengembalikan uang yang dinyatakan BPK-RI wajib untuk dikembalikan kepada

Sekretariat DPRD Kalbar belum lama ini. "Ada kesalahan administrasi pada anggaran perjalanan dinas yang menjadi penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) belum lama ini," katanya.

Sebagai contoh kasusnya sendiri, dalam tanggal ditulis ganda padahal tidak seperti itu kenyataannya. Ke depan saya berharap Sekretariat DPRD Kalbar dapat meningkatkan SDM agar lebih teliti dalam administrasi negara

Sebelumnya sebanyak 11 anggota DPRD Kalbar kembali berulah, perjalanan dinas menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalbar antara lain Minsen, Nicodemus R Toun, Prabasa Anantatur, Alifuddin, Tapanus, Thomas Aleksander, Syafrani, Sy Umar Alkadrie, Gusti Efendi, Bachwi dan Ary Pudyanti.

Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik BPK RI Perwakilan Kalbar atas pertanggungjawaban realisasi belanja perjalanan dinas luar daerah dan dokumen lain terkait, bahwa terdapat pembayaran

perjalanan dinas itu tidak sesuai ketentuan dan berindikasi merugikan keuangan daerah puluhan juta rupiah.

"Terdapat realisasi belanja perjalanan dinas luar daerah yang dilakukan oleh anggota DPRD yang sama pada waktu yang bersamaan dengan perjalanan dinas luar daerah lainnya sebesar Rp27,3 juta dan diketahui terdapat perjalanan dinas luar daerah yang dilakukan empat orang anggota DPRD yang bersamaan waktunya dengan perjalanan dinas luar daerah lainnya," jelas Rizal.

Kemudian, kata dia, terdapat realisasi belanja perjalanan dinas luar daerah yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan sidang dalam TA 2010 sebesar Rp48,6 juta. Selain itu terdapat realisasi belanja perjalanan dinas luar daerah yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan reses TA 2010 sebesar Rp7,1 juta.

"Sehingga hal itu mengakibatkan adanya realisasi belanja perjalanan dinas luar daerah anggota DPRD Kalbar berindikasi merugikan daerah sebesar Rp83 juta yang

disebabkan, Sekretaris DPRD Provinsi Kalbar selaku pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD, dalam melaksanakan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan," ungkap Rizal.

Rizal menambahkan, selain itu pejabat penatausahaan keuangan (PPK) Sekretariat DPRD Provinsi Kalbar dalam verifikasi pertanggungjawaban realisasi belanja tidak sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya, BPK merekomendasikan kepada Gubernur Kalbar agar memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Sekretaris DPRD yang tidak mematuhi ketentuan terkait pengesahan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atau beban APBD. Serta memberikan sanksi kepada PPK Sekretariat DPRD yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam verifikasi pertanggungjawaban realisasi belanja sesuai ketentuan. (aca)